Siapkan SDM Siaga Bencana, 55 Sekolah di DIY Ditetapkan Jadi SPAB

KR-Franz Boedisoekarnanto

Paku Alam X menyerahkan sertifikat SPAB.

YOGYA (KR) - Upaya menyiapkan sumber daya manusia untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan kewaspadaan pada saat sebelum dan setelah terjadi bencana, dapat dimulai dari sekolah/madrasah. Untuk itu, Pemda DIY menetapkan 55 sekolah/ madrasah se-DIY menjadi Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB). Hal tersebut dilakukan karena tim Siaga Bencana pada sekolah/madrasah merupakan instrumen yang harus ada dalam penerapan SPAB untuk mewujudkan sekolah yang tangguh dan aman bencana.

"Tim Siaga Bencana sekolah adalah perwakilan warga sekolah yang telah mendapatkan pelatihan terkait pengurangan risiko bencana. Tim ini bertugas menyebarluaskan praktik budaya sadar bencana di sekolah melalui kesiapsiagaan pada saat sebelum dan setelah terjadi bencana,"kata Wakil Gubernur DIY Sri Paduka Paku Alam X dalam acara peresmian 55 sekolah/ madrasah se-DIY menjadi SPAB rintisan 2020-2022, di Bangsal Kepatihan, Rabu (2/11).

Wagub DIY mengatakan, hampir seluruh wilayah Indonesia termasuk DIY merupakan daerah rawan bencana. Potensi ancaman bencana di DIY baik bencana alam, bencana sosial, maupun non alam ini yang menjadi alasan Pemda DIY perlu menyiapkan sumber daya manusia untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan kewaspadaan pada saat sebelum dan setelah terjadi bencana, yang dimulai dari sekolah/madrasah.

Dalam kesempatan itu Deputi Bidang Pencegahan BNPB RI Prasinta Dewi menyatakan, peresmian 55 sekolah /madrasah se-DIY menjadi SPAB oleh Pemda DIY menjadi bagian penting dan menunjukkan dedikasi keterlibatan aktif pemerintah daerah untuk meningkatkan upaya mitigasi bencana di Yogyakarta. Khususnya jika merujuk pada data Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRB) tahun 2020, tidak ada kabupaten/kota yang berisiko ancaman bencana rendah di DIY.

"Kabupaten/kota di provinsi DIY menjadi dominan memiliki ancaman bencana dengan risiko tinggi dan sedang. Terutama ancaman gempa bumi, letusan gunung api, banjir, tanah longsor, kekeringan, gelombang ekstrem atau abrasi, kebakaran hutan dan lahan cuaca ekstrem, dan tsunami," jelas Prasinta Dewi.

Sementara itu, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DIY Biwara Yuswantana menyampaikan, DIY memiliki indeks risiko 126,34 atau dikategorikan sebagai sedang. Untuk itu perlu adanya upaya pengurangan risiko bencana secara komprehensif. Salah satunya adalah dengan meningkatkan pengetahuan masyarakat sampai ke tingkat paling bawah agar dapat memahami mengenali menyadari jenis ancaman bencana di sekitarnya. **(Ria)-f**

Brimob Polda DIY Baksos di Pasar Beringharjo

YOGYA (KR) - Satuan Brimob Polda DIY menggelar bakti sosial di Pasar Beringharjo, Rabu (2/11). Selain membagikan sembako, pasukan elite Polri ini juga melakukan bersih-bersih di pasar tradisional tersebut.

Dansat Brimob Polda DIY Kombes Pol Imam Suhadi SIK diwakilkan Wadansat AKBP Kokot Subiantoro SH mengatakan, kegiatan dalam rangka menyambut HUT Satuan Brimob ke- 77 pada 14 November mendatang. "Sebanyak 150 paket sembako kami bagikan untuk buruh gendong, penarik becak dan petugas kebersihan pasar. Kita memilih pasar karena memang banyak yang membutuhkan sehingga bantuan yang diberikan tepat sasaran," ungkapnya di lokasi.

KR- Wahyu Priyanti

Brimob Polda DIY bagikan sembako.

Mengusung tema Setia Berani Ikhlas Berbakti Untuk Negeri, Brimob Polda DIY juga melakukan bersih-bersih pasar dengan mengerahkan 150 personel. Membawa peralatan lengkap, para personel masuk ke lorong-lorong pasar melakukan bersih-bersih. Mereka juga tidak terlihat canggung, saat membersihkan tumpukan sampah dan mengangkutnya ke dalam muatan truk.

Lurah Pasar Beringharjo Timur, Udiyetno mengapresiasi baksos yang dilakukan oleh para personel Brimob.

"Kebetulan saat ini TPA (Tempat Pembuangan Sampah) dalam perbaikan, sehingga sampah menumpuk. Kami sangat terbantu sekali dengan kedatangan Brimob, apalagi ini sudah kedua kalinya," tutur Udiyetno. **(Ayu)-f**

Marine Cruise Yogya, Didik SDM Handal Kapal Pesiar

YOGYA (KR)-Marine Cruise merupakan perusahaan yang bergerak dibidang lembaga latihan kerja serta penyaluran tenaga kerja Indonesia.Sebagai satu-satunya perusahaan terbaik dalam mendidik dan menyalurkan tenaga kerja yang siap ditempatkan di kapal pesiar, keberadaan Marine Cruise Yogyakarta semakin dipercaya masyarakat.

KR-Istimewa

Dirut PT. Marine Cruise Indonesia - Yogyakarta. Rachmad Prajoko, bersama peserta Seminar & workshop Strategi meningkatkan jumlah Calon Crew Kapal Pesiar.

"Peluang masih untuk bekerja dikapal pesiar sangat besar. Kondisi itu menjadikan Marine Cruise Yogyakarta gencar melakukan promosi dan mendidik kader-kader terbaik. Sehingga setelah lulus mereka siap ditempatkan dan bekerja di kapal pesiar," kata Direktur utama Marine Cruise Yogyakarta Rachmad Prajoko di Yogyakarta, Selasa (1/11).

Rahmad Prajoko mengatakan, saat ini permintaan tenaga kerja oleh kapal pesiar dunia sangat tinggi hingga mencapai 3.000 sampai 3.500 orang pertahun. Namun saat ini Marine Cruise Yogyakarta hanya mampu memenuhi permintaan hanya 15-20 persen dari banyaknya permintaan kapal pesiar dunia tersebut. Untuk memenuhi permintaan pasar dunia Tenaga Kerja atau Crew Kapal Pasiar yang begitu besar, pada saat bersamaan rapat koordinasi dan konsolidasi perusahaan terutama Marketing Manager. Pihaknya sengaja melakukan penggemblengan khusus bagi para tenaga pemasaran dalam hal ini marketing manager di daerah-daerah. Seperti Lampung, Jambi dan Makasar serta Jateng & DIY.

"Guna meningkatkan kualitas SDM kami sengaja mengundang narasumber pakar Marketing & hukum Bisnis sekaligus Dekan FH UP45 Yogya Dr Agoes Parera. Semua itu kami lakukan untuk mendorong, motivasi kerja dan membantu peningkatan secara quantity dan quality para Crew Kapal Pesiar Dunia. Semua itu dikemas dalam bentuk seminar & workshop bertajuk strategi peningkatan Crew kapal pasiar dunia melalui fokus marketing plan," ungkap Rachmad Prajoko.

Rachmad Prajoko menjelaskan, Gunungkidul yang menjadi pusat pendidikan siswa dan calon kandidat benar-benar dididik secara mendalam hingga tiga bulan guna mendapatkan ilmu secara menyeluruh. Untuk pembiayaan yaitu siswa dikenakan biaya sebesar Rp.10.000.000 untuk biaya pendidikan dan Rp.250.000 untuk biaya pendaftaran. Biaya pendidikan 10 juta tersebut sudah termasuk asrama, seragam, buku-buku dan beberapa perlengkapan lainnya. Bagi masyarakat yang berminat mengikuti program ini bisa datang langsung ke Jl Wonosari-Jogja Km 5,3 Bandung, Playen, Gunungkidul atau menghubungi telp 081227754555 atau 0274- 2910657.

"Apabila siswa benar-benar tekun dan mempunyai semangat untuk maju maka ketika bekerja nantinya gaji yang ditawarkan sangat tinggi. Karena bagi pemula gaji yang ditawarkan Rp 10 juta hingga 15 juta dengan tidak ada potongan apapun, sedangkan untuk asisten Room Boy dan Asisten Waiter mencapai 20-30 juta/bulan sedangkan untuk Room Boy dan Waiter mencapai 20 juta sampai 60 juta/bulan,"terangnya.

Hal senada dikatakan oleh Andreas Supriyadi selaku operasional Maneger dari Marine Cruise Yogyakarta. Menurutnya, saat ini Pekerjaan Migran Indonesia (PMI) sesuai seruan Presiden Indonesia Jokowi mesti berada dan bekerja di sektor formal.

Karena bekerja di kapal pesiar adalah hotel terapung sehingga pekerjaan sama persis dengan bekerja di hotel pada umumnya, sehingga masuk menjadi sektor formal dan ada jenjang karir.

"Marine Cruise Yogyakarta adalah lembaga yang menjawab akan masalah tersebut dengan melatih dan mendidik siswa dan kandidat untuk bekerja di Kapal pesiar dunia,"tegas Andreas Supriyadi. **(Ria)**

KR-Istimewa

Kantor PT Marine Cruiser Indonesia di jalan Wonosari.

MIMBAR ALAT KELENGKAPAN DEWAN

DPRD KOTA YOGYAKARTA

BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

BERI PERLINDUNGAN, TARGET TAHUN DEPAN DINAIKKAN

Seluruh Produk Hukum Berhasil Dituntaskan

YOGYA (KR) - Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) menjadi salah satu alat kelengkapan dewan yang memiliki peran sentral. Hal ini berkaitan dengan salah satu penunjang ketugasan dewan dalam hal legislasi. Seluruh target produk hukum yang masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) tahun 2022 pun berhasil dituntaskan.

Terdapat sepuluh anggota Bapemperda DPRD Kota Yogyakarta. Dua orang anggota merangkap sebagai pimpinan yakni Tri Waluko Widodo sebagai ketua dan Emanuel Ardi Prasetya selaku wakil ketua. Merujuk tata tertib DPRD, Bapemperda memiliki tugas dan wewenang dalam mengorganisasikan pembentukan peraturan daerah mulai dari proses perencanaan, usulan hingga penetapan. Sedangkan dalam proses pembahasan di tiap rancangan peraturan daerah, Bapemperda dibantu oleh panitia khusus (pansus) yang dibentuk melalui sidang paripurna.

Propemperda tahun 2022 ditetapkan sebanyak 14 produk hukum. Tiga produk hukum di antaranya bersifat wajib atau tahunan karena berkaitan dengan anggaran dan penyelenggaraan pemerintah daerah. Di samping itu terdapat empat produk hukum yang diinisiasi oleh internal dewan, dan sisanya merupakan insiatif eksekutif atau Pemerintah Kota Yogyakarta.

Ketua Bapemperda DPRD Kota Yogyakarta Tri Waluko Widodo, memastikan seluruh Propemperda tahun 2022 berhasil dituntaskan. Penuntasan tersebut dilihat dari selesainya pembahasan di tingkat pansus sesuai dengan kaidah yang berlaku. "Alhamdulillah tidak ada yang tertunda. Semua bisa selesai dalam pembahasan," tandasnya.

Menurutnya, tata kala pembahasan rancangan peraturan daerah memiliki tahapan panjang. Diawali dengan penyusunan Propemperda yang harus mempertimbangkan empat aspek. Masing-masing ialah perintah perundang-undangan yang lebih tinggi, rencana pembangunan daerah, penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, serta aspirasi masyarakat. "Penyusunan Propemperda itu dilakukan setiap tahun dan harus selesai atau ditetapkan sebelum penetapan APBD. Sekarang kami juga tengah mengejar Propemperda tahun 2023," urai Widodo.

KR-Ardhi Wahdan

Tri Waluko Widodo

KR-Ardhi Wahdan

Emanuel Ardi Prasetya

Setelah Propemperda berhasil ditetapkan, langkah selanjutnya ialah pembentukan pansus untuk membahas tiap produk hukum yang sudah ditargetkan. Setiap pansus berisi paling banyak 15 anggota dewan. Bapemperda DPRD Kota Yogyakarta memberikan tenggat waktu paling lama tiga bulan bagi pansus dalam merampungkan pembahasan. Sepanjang tahun ini, kinerja pansus pun dinilainya sangat baik karena belum ada yang sampai melampaui tenggat waktu. "Tahapan di pansus memang cukup panjang mulai dari pendalaman materi bersama mitra kerja, mencari data pembanding hingga rapat dengar pendapat umum dengan melibatkan masyarakat. Tetapi tiga bulan itu kami nilai cukup, dan ternyata mampu dijalankan dengan baik," urainya.

Wakil Ketua Bapemperda DPRD Kota Yogyakarta Emanuel Ardi Prasetya, menambahkan dirinya mengapresiasi kinerja pansus yang cukup positif. Hal ini karena ketika ada pembahasan produk hukum yang molor, maka bisa berakibat pada tahapan lain yang sudah dikalkulasi oleh Bapemperda. Akibatnya, Propemperda yang sudah ditetapkan pun bisa berpotensi tertunda. Padahal jika sampai akhir tahun Propemperda tidak tuntas maka target di tahun depan otomatis tidak bisa ditambah.

Ardi menilai, produk hukum berupa peraturan daerah sejatinya memberikan perlindungan bagi masyarakat. Pasalnya, setiap program atau kegiatan yang dijalankan sudah terpayungi oleh kepastian hukum. Pemerintah daerah maupun masyarakat juga memiliki pedoman yang jelas. "Makanya ketika Propemperda tahun ini selesai semua, kami berupaya untuk menaikkan target pada tahun depan. Setidaknya maksimal bisa mencapai 18 produk hukum," katanya.

Semakin banyak target produk hukum, imbuh Ardi, memiliki nilai positif dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah. Terutama untuk mengantisipasi adanya perubahan undang-undang yang mengharuskan penyesuaian aturan di bawahnya. Apalagi perintah perundang-undangan merupakan aspek utama yang harus diprirotaskan. Sehingga jika dalam waktu tahun berjalan ada perintang undang-undang, maka tinggal melakukan penyesuaian tanpa harus mengubah Propemperda.

"Tinggal mengedrop rancangan peraturan daerah yang belum mendesak, dan mengganti yang prioritas atas perintah undang-undang. Tanpa harus mengubah Propemperda. Maknya tahun depan kami upayakan Propemperda dinaikkan paling tidak menjadi 18 produk hukum," imbuhnya.

Ardi menjelaskan, salah satu produk hukum yang cukup mendesak untuk dibahas pada awal tahun depan ialah berkaitan pajak daerah dan retribusi daerah. Sesuai aturan dari undang-undang yang baru, produk hukum terkait pajak dan retribusi harus menjadi satu kesatuan. Sementara selama ini di Kota Yogyakarta maupun daerah lain masih dipisah.

"Itu contoh perintah undang-undang yang baru saja kami terima di tahun ini. Sehingga kita masukkan menjadi prioritas untuk dibahas di awal tahun. Kalau kita tidak segera menyesuaikan, nanti kasihan masyarakat ketika undang-undang terkait hal tersebut sudah berlaku penuh," paparnya.

Kendati demikian, dalam kinerjanya Bapemperda harus menyesuaikan aturan baru. Khususnya perihal harmonisasi terhadap rancangan Propemperda. Jika selama ini cukup dilakukan bersama Bagian Hukum Setda Kota Yogyakarta, namun mulai Propemperda tahun 2023 yang dibahas saat ini, harmonisasinya diajukan ke Kementerian Hukum dan HAM. Diharapkan, proses harmonisasi tidak memakan waktu lama supaya tahapan yang sudah berjalan selama ini tetap terjaga. **(Dhi)-f**

KR-Ardhi Wahdan

Rapat kerja Bapemperda DPRD Kota Yogyakarta.

KR-Ardhi Wahdan

Pembahasan terkait rancangan produk hukum bersama tim eksekutif.